

Evaluasi Kebijakan Jalan Satu Arah dalam Mengurangi Kemacetan Lalu Lintas di Kota Gorontalo

Andi Abee Zoelthan Katili¹, Idewi Usman², Andi Ayla Azzorayya Katili³

¹MTs Negeri 1 Kota Gorontalo, ²Universitas Terbuka, ³MI Al Huda Kota Gorontalo

abee291210@gmail.com¹, idewiabee01@gmail.com²,
aylazzorayaa04@gmail.com³

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan jalan satu arah dalam mengurangi kemacetan lalu lintas di Kota Gorontalo, seperti Jalan Nani Wartabone dan Jalan Jenderal Soedirman. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode evaluatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri atas pihak Dinas Perhubungan, Kepolisian, pengguna jalan, pengemudi angkutan umum, pelaku usaha, dan masyarakat. Analisis data menggunakan model interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Evaluasi kebijakan dilakukan berdasarkan model evaluasi kebijakan William N. Dunn yang mencakup efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan jalan satu arah di Kota Gorontalo secara umum telah efektif dalam mengurangi kemacetan lalu lintas, meningkatkan kelancaran arus kendaraan, serta mengurangi konflik lalu lintas pada ruas jalan tertentu. Kebijakan ini juga dinilai cukup efisien karena mampu memberikan manfaat yang signifikan tanpa memerlukan pembangunan infrastruktur baru dalam skala besar. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa titik kepadatan lalu lintas yang memerlukan penanganan lebih lanjut. Oleh karena itu, evaluasi dan penyempurnaan kebijakan secara berkelanjutan diperlukan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan transportasi perkotaan di Kota Gorontalo.

Kata Kunci: Evaluasi Kebijakan, Jalan Satu Arah, Kemacetan Lalu Lintas, Transportasi Perkotaan

ABSTRACT

This study aims to evaluate the one-way road policy in reducing traffic congestion in Gorontalo City, such as Jalan Nani Wartabone and Jalan Jenderal Soedirman.. The research employed a qualitative approach with an evaluative method. Data were collected through observation, interviews, and documentation. Research informants consisted of

officials from the Transportation Agency, Police Department, road users, public transportation drivers, business actors, and community members. Data were analyzed using an interactive model involving data reduction, data presentation, and conclusion drawing. Policy evaluation was conducted using William N. Dunn's evaluation framework, which includes effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and appropriateness. The findings indicate that the one-way traffic policy has generally been effective in reducing traffic congestion, improving traffic flow, and minimizing traffic conflicts on several road segments in Gorontalo City. The policy was also considered efficient because it generated significant benefits without requiring large-scale infrastructure development. However, several congestion points still remain and require further attention. Therefore, continuous evaluation and policy improvement are necessary to enhance the effectiveness of urban transportation management in Gorontalo City.

Keywords: Policy Evaluation, One-Way Traffic System, Traffic Congestion, Urban Transportation

PENDAHULUAN

Kemacetan lalu lintas merupakan salah satu permasalahan utama yang dihadapi oleh berbagai kota di Indonesia seiring dengan meningkatnya pertumbuhan penduduk, urbanisasi, aktivitas ekonomi, dan jumlah kendaraan bermotor. Perkembangan wilayah perkotaan yang berlangsung secara cepat sering kali tidak diimbangi dengan peningkatan kapasitas infrastruktur transportasi yang memadai. Akibatnya, terjadi ketidakseimbangan antara volume kendaraan yang melintas dengan kapasitas jalan yang tersedia. Kondisi ini menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti meningkatnya waktu tempuh perjalanan, pemborosan bahan bakar, penurunan produktivitas masyarakat, meningkatnya tingkat polusi udara, serta menurunnya kualitas hidup masyarakat perkotaan. Permasalahan kemacetan tidak hanya menjadi isu teknis transportasi semata, tetapi juga telah berkembang menjadi persoalan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang memerlukan penanganan kebijakan secara komprehensif.

Di Indonesia, pertumbuhan kendaraan bermotor menunjukkan tren yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Tingginya kepemilikan kendaraan pribadi menjadi salah satu faktor dominan yang menyebabkan meningkatnya beban lalu lintas pada ruas-ruas jalan perkotaan. Di sisi lain, keterbatasan ruang perkotaan menyebabkan pembangunan jaringan jalan baru tidak dapat dilakukan secara masif. Oleh karena itu, pemerintah daerah dituntut untuk menerapkan berbagai strategi

manajemen dan rekayasa lalu lintas guna mengoptimalkan kapasitas jalan yang tersedia. Salah satu bentuk kebijakan yang banyak diterapkan di berbagai kota adalah sistem jalan satu arah (*one way system*), (Purwanto, 2015). Kebijakan ini bertujuan mengurangi konflik pergerakan kendaraan, meningkatkan kapasitas jalan, memperlancar arus lalu lintas, serta mengurangi titik-titik kemacetan pada kawasan perkotaan yang memiliki tingkat kepadatan tinggi.

Sistem jalan satu arah merupakan bentuk rekayasa lalu lintas yang mengatur pergerakan kendaraan hanya dalam satu arah pada ruas jalan tertentu, (Romadhona, 2018). Penerapan sistem ini didasarkan pada asumsi bahwa pengurangan konflik kendaraan dari arah berlawanan dapat meningkatkan efisiensi penggunaan ruang jalan. Selain itu, sistem satu arah dapat memperbesar kapasitas efektif jalan karena seluruh lebar jalan dimanfaatkan untuk satu arah pergerakan kendaraan. Dalam praktiknya, kebijakan ini telah diterapkan di berbagai kota besar maupun menengah di Indonesia sebagai salah satu solusi untuk mengatasi kemacetan lalu lintas yang semakin kompleks. Namun demikian, efektivitas kebijakan jalan satu arah sering kali berbeda-beda pada setiap daerah karena dipengaruhi oleh karakteristik jaringan jalan, perilaku pengguna jalan, kondisi tata ruang, serta tingkat kepatuhan masyarakat terhadap aturan lalu lintas.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem jalan satu arah mampu memberikan dampak positif terhadap peningkatan kinerja lalu lintas. Penelitian yang dilakukan pada kawasan Jalan Mataram di Kota Yogyakarta menemukan bahwa penerapan sistem satu arah mampu meningkatkan kecepatan kendaraan dan menurunkan tingkat kejenuhan jalan dibandingkan kondisi sebelumnya. Tingkat pelayanan jalan juga mengalami peningkatan setelah kebijakan tersebut diterapkan sehingga arus kendaraan menjadi lebih lancar. Temuan tersebut menunjukkan bahwa rekayasa lalu lintas melalui sistem satu arah dapat menjadi alternatif solusi yang efektif dalam mengatasi kemacetan pada kawasan perkotaan yang memiliki keterbatasan kapasitas jalan.

Penelitian lain mengenai efektivitas kebijakan manajemen rekayasa lalu lintas sistem satu arah di Kota Palu menunjukkan bahwa kebijakan tersebut mampu mengurangi tingkat kemacetan, meningkatkan kualitas pelayanan jalan, serta menurunkan tingkat kecelakaan lalu lintas. Keberhasilan implementasi kebijakan tersebut tidak hanya ditentukan oleh aspek teknis transportasi, tetapi juga dipengaruhi oleh proses sosialisasi, koordinasi antarinstansi, dan partisipasi

masyarakat dalam mendukung pelaksanaan kebijakan. Dengan demikian, efektivitas kebijakan jalan satu arah tidak dapat diukur hanya melalui indikator lalu lintas, tetapi juga perlu memperhatikan aspek implementasi kebijakan dan respons masyarakat terhadap perubahan sistem transportasi yang diterapkan pemerintah.

Meskipun demikian, penerapan sistem jalan satu arah tidak selalu menghasilkan dampak yang sepenuhnya positif. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kebijakan tersebut dapat menimbulkan konsekuensi baru, seperti bertambahnya jarak tempuh kendaraan, perubahan pola perjalanan masyarakat, pergeseran titik kemacetan ke ruas jalan lain, serta meningkatnya biaya operasional transportasi. Penelitian mengenai sistem satu arah di Kota Bogor menunjukkan bahwa perubahan jalur perjalanan akibat kebijakan tersebut berdampak pada kinerja pelayanan angkutan kota dan menyebabkan perubahan trayek yang harus disesuaikan oleh operator transportasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan jalan satu arah perlu dievaluasi secara menyeluruh agar manfaat yang diperoleh lebih besar dibandingkan dampak negatif yang ditimbulkan.

Dalam konteks perkotaan modern, evaluasi kebijakan publik menjadi bagian penting dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui sejauh mana suatu kebijakan mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Melalui evaluasi, pemerintah dapat mengidentifikasi keberhasilan, kelemahan, hambatan, serta dampak yang muncul dari implementasi suatu kebijakan. Evaluasi juga menjadi dasar bagi pengambilan keputusan selanjutnya, baik dalam bentuk perbaikan, pengembangan, maupun penghentian kebijakan tertentu. Oleh karena itu, evaluasi terhadap kebijakan jalan satu arah menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut benar-benar efektif dalam mengurangi kemacetan lalu lintas dan meningkatkan kualitas pelayanan transportasi perkotaan.

Kota Gorontalo sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, pendidikan, dan jasa di Provinsi Gorontalo mengalami perkembangan aktivitas perkotaan yang cukup pesat dalam beberapa tahun terakhir. Peningkatan jumlah penduduk dan pertumbuhan aktivitas ekonomi menyebabkan mobilitas masyarakat semakin tinggi. Kondisi tersebut berdampak pada meningkatnya volume kendaraan yang menggunakan ruas-ruas jalan utama di Kota Gorontalo, seperti jalan Nani Wartabone, jalan Jenderal Soedirman, yang berada di depan kampus Universitas Negeri Gorontalo. Pada jam-jam sibuk, ruas jalan tersebut mengalami kepadatan

lalu lintas yang cukup tinggi sehingga menimbulkan antrian kendaraan dan penurunan kecepatan perjalanan. Fenomena ini menunjukkan bahwa permasalahan kemacetan lalu lintas mulai menjadi tantangan penting dalam pengelolaan transportasi perkotaan di Kota Gorontalo.

Sebagai upaya mengatasi permasalahan tersebut, Pemerintah Kota Gorontalo melalui instansi seperti Dinas Perhubungan Kota Gorontalo dan Kepolisian melakukan berbagai langkah manajemen dan rekayasa lalu lintas, salah satunya dengan menerapkan kebijakan jalan satu arah pada ruas jalan strategis tersebut. Kebijakan ini diharapkan mampu meningkatkan kelancaran arus lalu lintas, mengurangi konflik kendaraan, meningkatkan keselamatan pengguna jalan, serta menciptakan sistem transportasi yang lebih tertib dan efisien. Namun demikian, keberhasilan suatu kebijakan tidak dapat hanya dilihat dari tujuan yang direncanakan, melainkan harus diukur berdasarkan kondisi nyata yang terjadi setelah kebijakan diterapkan.

Dalam praktiknya, penerapan jalan satu arah sering menimbulkan beragam tanggapan dari masyarakat. Sebagian pengguna jalan menilai bahwa sistem tersebut mampu memperlancar arus kendaraan dan mengurangi kemacetan pada titik tertentu. Akan tetapi, sebagian lainnya seperti para pengemudi bentor berpendapat bahwa kebijakan tersebut justru menyebabkan perjalanan menjadi lebih jauh, membingungkan pengguna jalan, dan memindahkan kemacetan ke lokasi lain. Berbagai pengalaman di beberapa kota di Indonesia menunjukkan bahwa efektivitas sistem satu arah sangat bergantung pada kondisi lokal, karakteristik jaringan jalan, tingkat kepatuhan masyarakat, serta kesiapan pemerintah dalam melakukan pengawasan dan evaluasi secara berkelanjutan.

Perkembangan kajian transportasi perkotaan menunjukkan bahwa kebijakan pengaturan lalu lintas perlu didasarkan pada prinsip keberlanjutan dan efisiensi mobilitas. Penanganan kemacetan tidak hanya berfokus pada peningkatan kapasitas jalan, tetapi juga pada optimalisasi sistem transportasi secara keseluruhan. Berbagai studi menegaskan bahwa pengelolaan lalu lintas yang baik memerlukan pendekatan terpadu yang melibatkan aspek infrastruktur, regulasi, teknologi, serta perilaku pengguna jalan. Oleh karena itu, evaluasi terhadap kebijakan jalan satu arah perlu dilakukan dengan mempertimbangkan indikator yang komprehensif, seperti tingkat kemacetan, kecepatan kendaraan, kapasitas jalan, keselamatan lalu lintas,

kenyamanan pengguna jalan, serta persepsi masyarakat terhadap kebijakan yang diterapkan.

KAJIAN TEORI

Konsep Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan yang dirancang dan dilaksanakan oleh pemerintah untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat. Kebijakan publik lahir sebagai bentuk intervensi pemerintah dalam mengatur kehidupan sosial, ekonomi, politik, maupun pembangunan guna mencapai tujuan tertentu.

Menurut William N. Dunn, kebijakan publik adalah pola tindakan yang saling berkaitan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk memecahkan masalah publik tertentu. Kebijakan tidak hanya berupa keputusan formal, tetapi juga mencakup proses implementasi dan evaluasi yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Riedho & Angga, 2024).

Dalam perspektif administrasi publik, kebijakan publik memiliki beberapa tahapan utama yang meliputi: 1. Identifikasi masalah public; 2. Perumusan kebijakan; 3. Adopsi kebijakan; 4. Implementasi kebijakan; 5. Evaluasi kebijakan. Tahapan evaluasi menjadi sangat penting karena berfungsi untuk mengukur keberhasilan kebijakan serta memberikan umpan balik bagi proses perbaikan kebijakan pada masa yang akan datang.

Teori Evaluasi Kebijakan Publik

Evaluasi kebijakan merupakan proses penilaian terhadap pelaksanaan dan hasil suatu kebijakan guna mengetahui tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut Dunn, evaluasi kebijakan adalah kegiatan yang bertujuan menghasilkan informasi mengenai nilai atau manfaat suatu kebijakan. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui apakah kebijakan telah berjalan sesuai tujuan, efisien, memberikan manfaat kepada masyarakat, dan layak untuk dipertahankan atau diperbaiki (Fitria & Rosdiana, 2025).

William N. Dunn mengemukakan enam kriteria utama dalam evaluasi kebijakan, yaitu:

1. Efektivitas (Effectiveness)

Efektivitas berkaitan dengan tingkat keberhasilan suatu kebijakan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam penelitian ini, efektivitas diukur

melalui: 1. Penurunan tingkat kemacetan lalu lintas; 2. Kelancaran arus kendaraan; 3. Peningkatan kecepatan perjalanan; 4. Pengurangan antrean kendaraan.

2. Efisiensi (*Efficiency*)

Efisiensi menunjukkan hubungan antara hasil yang diperoleh dengan sumber daya yang digunakan. Indikator efisiensi dalam penelitian ini meliputi: 1. Penggunaan anggaran pelaksanaan kebijakan; 2. Efektivitas penggunaan fasilitas lalu lintas; 3. Penghematan waktu perjalanan masyarakat.

3. Kecukupan (*Adequacy*)

Kecukupan menunjukkan sejauh mana kebijakan mampu menyelesaikan masalah yang menjadi dasar pembentukannya. Dalam konteks penelitian ini, kecukupan dilihat dari kemampuan sistem jalan satu arah dalam mengatasi kemacetan pada ruas jalan yang menjadi sasaran kebijakan.

4. Pemerataan (*Equity*)

Pemerataan berkaitan dengan distribusi manfaat dan dampak kebijakan kepada seluruh kelompok masyarakat. Pada penelitian ini, aspek pemerataan mencakup: 1. Dampak kebijakan terhadap pengguna kendaraan pribadi; 2. Dampak terhadap pengendara sepeda motor; 3. Dampak terhadap angkutan umum; 4. Dampak terhadap pelaku usaha di sekitar ruas jalan.

5. Responsivitas (*Responsiveness*)

Responsivitas mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap kebijakan yang diterapkan pemerintah. Indikator responsivitas meliputi: 1. Tanggapan masyarakat terhadap sistem satu arah; 2. Tingkat penerimaan Masyarakat; 3. Persepsi masyarakat mengenai manfaat kebijakan.

6. Ketepatan (*Appropriateness*)

Ketepatan berkaitan dengan kesesuaian kebijakan dengan kebutuhan masyarakat dan kondisi lingkungan tempat kebijakan diterapkan. Dalam penelitian ini, ketepatan dilihat dari kesesuaian penerapan jalan satu arah dengan kondisi lalu lintas Kota Gorontalo. Teori evaluasi kebijakan William N. Dunn dipilih karena mampu memberikan kerangka analisis yang komprehensif dalam menilai keberhasilan kebijakan jalan satu arah dari berbagai aspek, baik aspek teknis maupun sosial.

Konsep Kemacetan Lalu Lintas

Kemacetan lalu lintas merupakan kondisi ketika volume kendaraan yang menggunakan jalan melebihi kapasitas jalan sehingga kecepatan kendaraan menurun dan arus lalu lintas menjadi tidak lancar.

Kemacetan terjadi akibat ketidakseimbangan antara jumlah kendaraan dengan kapasitas infrastruktur jalan yang tersedia. Faktor-faktor penyebab kemacetan meliputi: 1. Pertumbuhan kendaraan bermotor; 2. Keterbatasan kapasitas jalan; 3. Aktivitas parkir di badan jalan; 4. Persimpangan yang padat; 5. Perilaku pengguna jalan yang tidak tertib; 6. Manajemen lalu lintas yang kurang optimal.

Penelitian transportasi modern menunjukkan bahwa kemacetan merupakan fenomena kompleks yang dipengaruhi oleh interaksi antara infrastruktur, perilaku pengemudi, dan pola pergerakan kendaraan. Bahkan perubahan kecil pada kapasitas jalan dapat menyebabkan penurunan signifikan terhadap kinerja lalu lintas. Dalam konteks perkotaan Indonesia, pertumbuhan kendaraan yang tidak sebanding dengan kapasitas jalan menjadi penyebab utama meningkatnya kemacetan pada kawasan pusat aktivitas ekonomi dan pemerintahan.

Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas

Manajemen lalu lintas merupakan upaya perencanaan, pengaturan, pengawasan, dan pengendalian arus kendaraan guna meningkatkan efisiensi penggunaan jaringan jalan. Tujuan utama manajemen lalu lintas meliputi: 1. Meningkatkan kelancaran lalu lintas; 2. Mengurangi kemacetan; 3. Meningkatkan keselamatan pengguna jalan; 4. Mengoptimalkan kapasitas jalan yang tersedia; 5. Mengurangi dampak lingkungan akibat kemacetan.

Salah satu bentuk manajemen lalu lintas yang sering digunakan adalah rekayasa lalu lintas melalui penerapan sistem satu arah. Sistem ini dirancang untuk mengurangi konflik kendaraan dari arah berlawanan dan meningkatkan kapasitas efektif jalan. Penelitian di berbagai kota menunjukkan bahwa manajemen lalu lintas yang tepat dapat meningkatkan tingkat pelayanan jalan dan mengurangi kepadatan kendaraan pada jam sibuk.

Teori Sistem Jalan Satu Arah (*One Way System*)

Sistem jalan satu arah merupakan kebijakan rekayasa lalu lintas yang mengatur pergerakan kendaraan hanya dalam satu arah pada ruas jalan tertentu. Tujuan penerapan sistem jalan satu arah adalah: 1. Mengurangi konflik lalu lintas;

2. Meningkatkan kapasitas jalan; 3. Memperlancar arus kendaraan; 4. Mengurangi waktu perjalanan; 5. Meningkatkan keselamatan lalu lintas.

Menurut berbagai penelitian transportasi, sistem satu arah dapat meningkatkan efisiensi pergerakan kendaraan karena seluruh lebar jalan digunakan untuk satu arah pergerakan. Selain itu, jumlah titik konflik pada persimpangan dapat berkurang sehingga risiko kecelakaan lalu lintas menjadi lebih rendah.

Namun demikian, penerapan sistem satu arah juga memiliki beberapa kelemahan, antara lain: 1. Bertambahnya jarak tempuh perjalanan; 2. Perubahan pola perjalanan masyarakat; 3. Potensi perpindahan titik kemacetan ke ruas jalan lain; 4. Kebingungan pengguna jalan pada tahap awal implementasi.

Diskusi publik mengenai sistem satu arah di beberapa kota menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan ini sangat dipengaruhi oleh evaluasi berkelanjutan, kesiapan infrastruktur pendukung, dan pengawasan lapangan yang konsisten.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif (Tobing & David, 2017) dengan metode evaluatif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian berupaya memahami secara mendalam pelaksanaan kebijakan jalan satu arah serta dampaknya terhadap pengurangan kemacetan lalu lintas di Kota Gorontalo. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai persepsi para pemangku kepentingan, pengguna jalan, dan masyarakat terhadap kebijakan yang diterapkan pemerintah.

Metode evaluatif digunakan karena penelitian ini bertujuan menilai tingkat keberhasilan kebijakan jalan satu arah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, yaitu mengurangi kemacetan lalu lintas di Kota Gorontalo. Evaluasi dilakukan menggunakan model evaluasi kebijakan William N. Dunn yang meliputi efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan (Dunn, 2018).

Penelitian dilaksanakan di Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, mulai Januari hingga Juni 2026, khususnya pada ruas jalan yang telah menerapkan sistem jalan satu arah berdasarkan kebijakan Pemerintah Kota Gorontalo, yaitu Jalan Nani Wartabone dan Jalan Jenderal Soedirman.

Sumber data berasal dari data primer dan data sekunder. Teknik penentuan informasi dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling merupakan teknik pemilihan informan berdasarkan pertimbangan tertentu sesuai kebutuhan penelitian (Sugiyono, 2022). Adapun kriteria informan meliputi: 1. Memahami

kebijakan jalan satu arah; 2. Terlibat dalam implementasi kebijakan; 3. Mengalami dampak langsung kebijakan; 4. Bersedia memberikan informasi secara objektif.

Jumlah informan dapat berkembang sesuai kebutuhan penelitian hingga mencapai titik kejenuhan data (*data saturation*). Dan Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan model analisis data interaktif dari Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, dan Johnny Saldaña yang terdiri atas: 1. Pengumpulan Data (Data Collection); 2. Reduksi Data (Data Reduction); dan 3. Penyajian Data (Data Display). Untuk menjamin validitas data digunakan teknik triangulasi sumber, teknik dan waktu.

Tabel 1. Definisi Operasional Fokus Penelitian

| Fokus Evaluasi Indikator | Parameter |
|--------------------------|---|
| Efektivitas | Kelancaran lalu lintas Kecepatan kendaraan, antrean kendaraan |
| Efisiensi | Penggunaan sumber daya Waktu tempuh, biaya operasional |
| Kecukupan | Penyelesaian masalah Tingkat penurunan kemacetan |
| Pemerataan | Distribusi manfaat Manfaat bagi seluruh pengguna jalan |
| Responsivitas | Respon masyarakat Tingkat kepuasan dan penerimaan |
| Ketepatan | Kesesuaian kebijakan Kesesuaian lokasi dan tujuan kebijakan |

Sumber: Peneliti 2026

HASIL PENELITIAN

Hasil penelitian disajikan berdasarkan indikator evaluasi kebijakan William N. Dunn yang meliputi efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan.

Efektivitas Kebijakan Jalan Satu Arah

Efektivitas berkaitan dengan sejauh mana kebijakan mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan utama penerapan sistem jalan satu arah di Kota Gorontalo adalah: 1. Mengurangi kemacetan lalu lintas; 2. Memperlancar arus kendaraan; 3. Mengurangi konflik kendaraan pada persimpangan; 4. Meningkatkan keselamatan lalu lintas.

Berdasarkan hasil observasi lapangan, penerapan sistem jalan satu arah menunjukkan adanya peningkatan kelancaran arus kendaraan pada ruas jalan Nani Wartabone dan jalan Jenderal Soedirman yang menjadi objek penelitian.

Tabel 2. Perbandingan Kondisi Lalu Lintas Sebelum dan Sesudah Penerapan Jalan Satu Arah

| Indikator | Sebelum | Sesudah |
|-------------------------------|----------------|----------------|
| Kecepatan rata-rata kendaraan | Rendah | Meningkat |
| Panjang antrean kendaraan | Tinggi | Menurun |
| Kepadatan lalu lintas | Tinggi | Menurun |
| Konflik kendaraan | Sering terjadi | Berkurang |

Sumber: Peneliti 2026

Hasil wawancara dengan pihak Dinas Perhubungan menunjukkan bahwa kebijakan jalan satu arah mampu meningkatkan kelancaran lalu lintas terutama pada jam sibuk. Salah satu informan menyatakan: "Setelah diterapkan sistem satu arah, kendaraan tidak lagi saling berhadapan sehingga arus lalu lintas menjadi lebih lancar dibanding sebelumnya." Temuan tersebut menunjukkan bahwa kebijakan jalan satu arah cukup efektif dalam mengurangi kemacetan pada ruas jalan tersebut yang menjadi sasaran kebijakan.

Efisiensi Kebijakan Jalan Satu Arah

Efisiensi berkaitan dengan penggunaan sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan kebijakan. Berdasarkan hasil penelitian, penerapan jalan satu arah tidak memerlukan pembangunan infrastruktur jalan baru yang membutuhkan biaya besar. Pemerintah hanya melakukan: 1. Pemasangan rambu lalu lintas; 2. Penyesuaian marka jalan; 3. Sosialisasi kepada Masyarakat; 4. Pengawasan oleh petugas lalu lintas.

Tabel 3. Bentuk Penggunaan Sumber Daya dalam Kebijakan Jalan Satu Arah

| Sumber Daya | Bentuk Pemanfaatan |
|--------------------|-----------------------------------|
| Anggaran | Pengadaan rambu dan marka |
| SDM | Petugas Dishub dan Kepolisian |
| Sarana | Rambu, marka, dan papan informasi |
| Teknologi | Sistem pengawasan lalu lintas |

Sumber: Peneliti 2026

Hasil wawancara menunjukkan bahwa masyarakat merasakan adanya penghematan waktu perjalanan dibandingkan sebelum penerapan sistem satu arah.

Dengan demikian, kebijakan jalan satu arah dapat dikategorikan cukup efisien karena mampu meningkatkan kelancaran lalu lintas tanpa memerlukan investasi infrastruktur yang besar.

Kecukupan Kebijakan Jalan Satu Arah

Kecukupan mengukur sejauh mana kebijakan mampu menyelesaikan masalah yang menjadi dasar pembentukannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan jalan satu arah berhasil mengurangi tingkat kemacetan pada ruas jalan tertentu. Namun demikian, masih ditemukan beberapa titik yang mengalami kepadatan lalu lintas terutama pada persimpangan yang terhubung dengan ruas jalan satu arah.

Tabel 4. Tingkat Penyelesaian Masalah Kemacetan

| Lokasi | Kondisi Setelah Kebijakan |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Ruas Jalan Nani Wartabone | Kemacetan berkurang |
| Ruas Jalan Jenderal Soedirman | Kemacetan berkurang |
| Simpang UNG | Masih terjadi kepadatan |
| Simpang Jenderal Soedirman | Kepadatan menurun |

Sumber: Peneliti 2026

Hasil ini menunjukkan bahwa kebijakan jalan satu arah belum sepenuhnya menyelesaikan seluruh masalah kemacetan, tetapi telah memberikan kontribusi positif terhadap perbaikan kondisi lalu lintas.

Pemerataan Kebijakan Jalan Satu Arah

Pemerataan berkaitan dengan distribusi manfaat kebijakan kepada seluruh kelompok masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar pengguna jalan merasakan manfaat dari penerapan sistem satu arah. Kelompok yang memperoleh manfaat terbesar adalah: 1. Pengguna kendaraan pribadi; 2. Pengendara sepeda motor; 3. Pengemudi angkutan umum.

Namun demikian, beberapa pelaku usaha menyampaikan bahwa perubahan arah lalu lintas menyebabkan akses menuju lokasi usaha menjadi lebih panjang bagi sebagian pelanggan.

Tabel 5. Dampak Kebijakan Berdasarkan Kelompok Masyarakat

| Kelompok | Dampak |
|----------------------------|---------------|
| Pengguna kendaraan pribadi | Positif |

| Kelompok | Dampak |
|------------------|---------|
| Pengendara motor | Positif |
| Angkutan umum | Positif |
| Pelaku usaha | Beragam |

Sumber: Peneliti 2026

Meskipun terdapat beberapa dampak negatif, secara umum manfaat kebijakan lebih dominan dibandingkan kerugian yang dirasakan masyarakat.

Responsivitas Kebijakan Jalan Satu Arah

Responsivitas mengukur tingkat penerimaan masyarakat terhadap kebijakan yang diterapkan. Hasil wawancara menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat mendukung kebijakan jalan satu arah karena dianggap mampu memperlancar arus lalu lintas.

Tabel 6. Respon Masyarakat terhadap Kebijakan Jalan Satu Arah

| Respon | Persentase |
|-----------------|------------|
| Mendukung | 72% |
| Cukup mendukung | 18% |
| Tidak mendukung | 10% |

Sumber: Peneliti 2026

Alasan masyarakat mendukung kebijakan tersebut antara lain: 1. Waktu perjalanan lebih singkat; 2. Kemacetan berkurang; 3. Perjalanan lebih nyaman; 4. Risiko kecelakaan menurun. Sementara itu, kelompok yang tidak mendukung beralasan bahwa perjalanan menjadi lebih jauh dan memerlukan penyesuaian rute.

Ketepatan Kebijakan Jalan Satu Arah

Ketepatan menunjukkan kesesuaian kebijakan dengan kebutuhan masyarakat dan kondisi lapangan. Berdasarkan hasil penelitian, lokasi penerapan jalan satu arah dipilih pada ruas jalan yang memiliki volume lalu lintas tinggi sehingga kebijakan dinilai cukup tepat.

Tabel 7. Penilaian Ketepatan Kebijakan

| Aspek | Hasil |
|---------------------------------|-------------|
| Kesesuaian lokasi | Tepat |
| Kesesuaian tujuan | Tepat |
| Kesesuaian kebutuhan masyarakat | Cukup tepat |

| Aspek | Hasil |
|--------------------------|-------|
| Kesesuaian kondisi jalan | Tepat |

Sumber: Peneliti 2026

Temuan ini menunjukkan bahwa kebijakan jalan satu arah telah dirancang berdasarkan kebutuhan pengelolaan lalu lintas perkotaan.

PEMBAHASAN

Evaluasi Efektivitas Kebijakan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan jalan satu arah berhasil meningkatkan kelancaran lalu lintas dan mengurangi kepadatan kendaraan pada beberapa ruas jalan utama Kota Gorontalo. Temuan ini sejalan dengan penelitian (Haris, 2019) yang menemukan bahwa sistem satu arah mampu meningkatkan kualitas pelayanan lalu lintas dan mengurangi kemacetan pada kawasan perkotaan. Dari perspektif teori evaluasi William N. Dunn, kebijakan ini dapat dikategorikan efektif karena tujuan utama berupa pengurangan kemacetan berhasil dicapai meskipun belum sepenuhnya optimal.

Evaluasi Efisiensi Kebijakan

Kebijakan jalan satu arah menunjukkan tingkat efisiensi yang baik karena mampu menghasilkan manfaat yang signifikan dengan penggunaan sumber daya yang relatif terbatas. Pemerintah tidak perlu melakukan pelebaran jalan atau pembangunan jalan baru yang membutuhkan biaya besar. Sebaliknya, optimalisasi jaringan jalan yang telah ada mampu meningkatkan kapasitas lalu lintas secara efektif. Temuan ini memperkuat teori manajemen lalu lintas yang menyatakan bahwa rekayasa lalu lintas merupakan solusi yang lebih ekonomis dibandingkan pembangunan infrastruktur baru.

Evaluasi Kecukupan Kebijakan

Meskipun tingkat kemacetan menurun, penelitian menemukan bahwa beberapa titik kepadatan masih terjadi pada jam-jam sibuk. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan jalan satu arah belum sepenuhnya mampu menyelesaikan seluruh permasalahan kemacetan. Oleh karena itu diperlukan kebijakan pendukung seperti: 1. Pengaturan parkir; 2. Optimalisasi persimpangan; 3. Penambahan fasilitas transportasi umum; 4. Penegakan disiplin berlalu lintas.

Evaluasi Pemerataan dan Responsivitas

Mayoritas masyarakat merasakan manfaat kebijakan sehingga tingkat penerimaan masyarakat tergolong tinggi. Namun demikian, pemerintah perlu memperhatikan kelompok masyarakat yang terdampak secara tidak langsung, khususnya pelaku usaha yang mengalami perubahan aksesibilitas akibat perubahan arah lalu lintas. Partisipasi masyarakat dalam proses evaluasi perlu terus ditingkatkan agar kebijakan yang diterapkan dapat lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Evaluasi Ketepatan Kebijakan

Dari aspek ketepatan, kebijakan jalan satu arah dinilai sesuai dengan kebutuhan Kota Gorontalo yang mengalami peningkatan volume kendaraan. Kebijakan ini juga diterapkan pada ruas jalan yang memiliki tingkat kepadatan tinggi sehingga sasaran kebijakan sudah tepat.

Berdasarkan analisis enam indikator evaluasi William N. Dunn, dapat disimpulkan bahwa kebijakan jalan satu arah di Kota Gorontalo secara umum telah memberikan dampak positif terhadap pengurangan kemacetan lalu lintas. Meskipun demikian, masih diperlukan penyempurnaan kebijakan dan evaluasi berkelanjutan agar manfaat yang dihasilkan dapat lebih optimal serta mampu menjawab tantangan transportasi perkotaan yang terus berkembang.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Kebijakan jalan satu arah yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Gorontalo secara umum telah efektif dalam mengurangi tingkat kemacetan lalu lintas pada ruas jalan yang menjadi sasaran kebijakan tersebut. Penerapan sistem satu arah mampu meningkatkan kelancaran arus kendaraan, mengurangi antrean kendaraan pada jam sibuk, serta meminimalkan konflik lalu lintas yang sebelumnya sering terjadi akibat pergerakan kendaraan dari arah berlawanan. Dengan berkurangnya hambatan lalu lintas, waktu perjalanan masyarakat menjadi lebih singkat dan mobilitas perkotaan menjadi lebih lancar.

Berdasarkan simpulan tersebut saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut: Pemerintah Kota Gorontalo perlu Melakukan evaluasi berkala terhadap kebijakan jalan satu arah; Meningkatkan koordinasi antara Dinas Perhubungan dan Kepolisian Mengoptimalkan manajemen persimpangan, Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendukung, Melakukan sosialisasi secara berkelanjutan.

Dinas Perhubungan Kota Gorontalo, perlu Melakukan survei lalu lintas secara rutin untuk memantau perubahan volume kendaraan dan tingkat pelayanan jalan; 2. Menyusun basis data transportasi yang terintegrasi sebagai bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan transportasi masa depan; 3. Mengembangkan sistem pemantauan lalu lintas berbasis teknologi informasi guna mendukung pengambilan keputusan yang lebih cepat dan akurat, 4 Melakukan kajian terhadap kemungkinan penerapan rekayasa lalu lintas tambahan pada kawasan yang masih mengalami kemacetan.

DAFTAR PUSTAKA

- Athey, S., & Imbens, G. (2016). *The state of applied econometrics: Causality and policy evaluation*. arXiv. <https://doi.org/10.48550/arXiv.1607.00699>
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2023). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (6th ed.). Sage Publications.
- Dunn, W. N. (2018). *Public policy analysis: An integrated approach* (6th ed.). Routledge.
- Humaira, N., & Nadjam, A. (2019). Evaluasi kinerja pelayanan angkutan kota akibat sistem satu arah Kota Bogor. *Construction and Material Journal*, 1(2), 61–72.
- Ito, K., & Biljecki, F. (2021). Assessing bikeability with street view imagery and computer vision. *Computers, Environment and Urban Systems*. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2105.08499>
- Lubis, K., Rangkuti, N. M., & Lubis, N. P. S. (2022). Penerapan manajemen transportasi dalam meningkatkan kinerja ruas jalan di perkotaan. *Journal of Civil Engineering Building and Transportation*, 6(2), 191–204. <https://doi.org/10.31289/jcebt.v6i2.7821>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2020). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (4th ed.). Sage Publications.
- Nababan, J. D. I., & Siswanto, H. (2025). Evaluasi penerapan sistem satu arah di kawasan heritage Kayutangan, Malang. *Jurnal Teknik Sipil*, 18(3). <https://doi.org/10.24002/jts.v18i3.14637>
- Nagel, K., Wolf, D. E., Wagner, P., & Simon, P. (1997). *Two-lane traffic rules for cellular automata: A systematic approach*. arXiv. <https://doi.org/10.48550/arXiv.cond-mat/9712196>
- Purwanto, D. (2015). *Efektifitas Pemberlakuan Sistem Satu Arah pada Jalan*

- Indraprasta Kota Semarang dalam Rangka Pemerataan Sebaran Beban Lalu Lintas Pendahuluan. 21(1), 47–55.*
- Romadhona, P. J. (2018). Solusi Jalan Satu Arah di Kota Yogyakarta. *Teknik*, 39(1), 25. <https://doi.org/10.14710/teknik.v39i1.13654>
- Riedho, M. R. Z., & Angga, I. M. P. (2024). Membangun silogisme pendekatan naratif dalam proses pembuatan dan analisis kebijakan publik William N. Dunn. *Jejaring Administrasi Publik*, 16(1). <https://doi.org/10.20473/jap.v16i1.53502>
- Setiawan, T. A., Ircham, & Anggorowati, V. D. A. (2021). Evaluasi penerapan sistem satu arah di ruas Jalan Mataram Yogyakarta dengan metode PKJI 2014. *Equilib*, 2(2), 76–84.
- Shahgholian, M., & Gharavian, D. (2018). Advanced traffic management systems: An overview and a development strategy. *Transportation Research Review*. <https://doi.org/10.48550/arXiv.1810.02530>
- Sudirman, I. (2021). Analisis proses pembentukan kebijakan publik: Studi kasus program Beasiswa Karawang Cerdas tahun 2020. *Epistemik: Indonesian Journal of Social and Political Science*, 2(1), 1–12.
- Tobing, H., & David. (2017). *Pendekatan Dalam Penelitian Kualitatif* (1st ed.). Program Studi Psikologi Fadok Udayana. https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_pondidikan_1_dir/434113472f0dc64681fc958a8037db67.pdf
- Treiber, M., Hennecke, A., & Helbing, D. (2000). *Congested traffic states in empirical observations and microscopic simulations*. arXiv. <https://doi.org/10.48550/arXiv.cond-mat/0002177>
- Wa' Bone, G., Rumayar, A. L. E., & Pandey, S. V. (2023). Analisis pemanfaatan manajemen lalu lintas sistem dua arah dan satu arah terhadap efektifitas kinerja ruas jalan. *TEKNO*, 21(83). <https://doi.org/10.35793/jts.v21i83.46688>
- Benseny, J., Lahteenmaki, J., Toyli, J., & Hammainen, H. (2023). Urban wireless traffic evolution: The role of new devices and the effect of policy. *Telecommunications Policy*. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2310.14406>